

DAFTAR PUSTAKA

- Anggara, S. (2014). *Kebijakan Publik* (1st ed.). Bandung: CV Pustaka Setia.
- Batam, Pos. (2018). *Batam, Pos*.
- Handoko, T. H. (2016). *Manajemen* (2nd ed.). Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta.
- Labiba, H. D. A., & Juliani, R. W. (2018). Tinjauan Hukum Tentang Penataan Pendistribusian Gas Elpiji 3 Kilogram Pada Pangkalan Gas Elpiji di Kabupaten Cianjur Dalam surat Keputusan Bupati Cianjur. *Ilmu Hukum*, 2(1), 43–56.
- Lisi, I. Z., Susanti, E., & Wahyudi. (2014). Implementasi Pasal 24 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 Tentang Metrologi Legal Terhadap Uji Alat Ukur Lpg 3 Kg Di SPPBE Kota Samarinda. *Ilmu Hukum*, 3(8), 1–16.
- Mukarom, Z., & Laksana, M. W. (2015). *Manajemen Pelayanan Publik*. (B. A. Saebani, Ed.) (1st ed.). Bandung: CV Pustaka Setia.
- Mukarom, Z., & Laksana, M. W. (2016). *Membangun Kinerja Pelayanan Publik* (1st ed.). Bandung: CV Pustaka Setia.
- Murhaini, S. (2014). *Manajemen Pengawasan Pemerintahan Daerah* (1st ed.). Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Pasolong, H. (2013). *Metode Penelitian Administrasi Publik* (1st ed.). Bandung: Alfabeta, cv.
- Pasumah, S. B., Lopian, M., & Liando, D. (2018). Pengawasan Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kota Bitung Dalam Pendistribusian Bahan Bakar Minyak Solar Industri PT. Stemar Jaya. *Ilmu Pemerintahan*, 1(1), 1–9.
- Safrida. (2016). Implementasi Kebijakan Pendistribusian Gas Bersubsidi Bagi Masyarakat Miskin di Kecamatan Dewantara. *Ilmu Administrasi Negara*, 3(September), 34–60.
- Samjonews. (2016). Masyarakat Batam Sangat Resah, Isi Tabung Gas 3 Kg Tidak Sesuai Dengan Isi Volume Yang Standar. *Samjonews*.
- Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (21st ed.). Bandung: Alfabeta, cv.
- Sule, E. T., & Saefullah, K. (2014). *Pengantar Manajemen* (1st ed.). Jakarta: Prenadamedia Group.
- Suroso, S. D. (2016). Studi Tentang Fungsi Seksi Metrologi Legal Dinas Perindustrian dan Perdagangan Dalam Pengawasan dan Penyidikan Pada Alat Ukur Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) Untuk Masyarakat Kota Samarinda. *Ilmu Pemerintahan*, 4(1), 383–397.
- Suryanto, M. H. (2016). *Sistem Operasional Manajemen Distribusi*. (T. Lesmana, Ed.) (1st ed.). Jakarta: PT Grasindo.
- Suryanto, M. H. (2017). *Metode Riset & Analisis Saluran Distribusi* (1st ed.). Jakarta: PT Grasindo.
- TribunNews. (2017). Pendistribusian Gas Elpiji 3 Kg Tidak Transparan. *TribunNews.co.id*.

Viva, T. (2018). 2018, Distribusi Tertutup LPG 3 Kg Berlaku di Seluruh RI. *Viva.co.id*.

Undang-Undang

KEPMEN ESDM Republik Indonesia Nomor 7889 K/12/MEM/2016 Tentang Perubahan atas KEPMEN ESDM Nomor 5881 K/12/MEM/2016 Tentang Harga Patokan Liquefied Potroleum Gas Tabung 3 Kilogram Tahun Anggaran 2016.

Peraturan Menteri ESDM Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Kegiatan Penyaluran Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas Dan Liquefied Potroleum Gas.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2004 Tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak Dan Gas Bumi.

Peraturan Pemerintah nomor 20 tahun 2001 dan Undang-Undang Nomor 22 tahun 2001 Tentang Migas, segala kegiatan yang berhubungan dengan pengangkutan, pengelolaan dan perniagaan di lakukan oleh badan yang memiliki izin dari pemerintah melalui dinas terkait.

Peraturan Presiden Nomor 104 tahun 2007 tentang penyediaan pendistribusian dan penetapan harga gas LPG 3 kg.

Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor 26 tahun 2009 tentang penyediaan dan pendistribusian gas LPG bersubsidi bagi masyarakat miskin.

Peraturan Menteri ESDM Nomor 021 Tahun 2007

Peraturan Walikota Batam Nomor 37 Tahun 2013

Surat Edaran Walikota Batam Nomor 123 Tahun 2017

Surat Edaran Kepala Dinas Perindag Kota Batam Nomor 176 Tahun 2017

Website

www.kemendag.go.id/

<http://disperindag.batam.go.id/>

<http://ikm-disperindag.kepriprov.go.id/>